

## KUASA KAPITALISME DAN ARENA ORGANISASI GLOBAL

### Arah Multipolarisasi Globalisasi Ekonomi

Perkembangan kapitalisme global tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip ekonomi klasik yang sampai saat ini terus dipertahankan bahkan pada domain-domain yang tidak terbayangkan akan mengalami proses-proses transformasi ideologi pasar tersebut. Kapitalisme sebagai sistem dunia yang bermula pada awal abad ke-16 ketika orang-orang Eropa berhamburan keluar dari sudut kecil dunia untuk berdagang menaklukkan, dan merampas, semakin menunjukkan kejayaannya terutama sejak runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya era perang dingin (Gelinas, 2003: 16). Kapitalisme global secara simbolik telah memulai masa dimana kemenangannya atas komunisme dan sosialis ditandai dengan berjayanya jargon demokrasi dan pasar bebas. Mesin ekonomi global mulai diciptakan oleh kapitalisme melalui instrumen-instrumennya mencari eksistensi kehidupan melalui ekspansi modal dan penimbunan keuntungan (*profit*). Sehingga kuasa ekonomi makro (kapitalisme) mulai bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis pada permintaan dan penawaran. Hal yang sama masih berlangsung hingga detik ini, ketika indikator perekonomian kontemporer juga mengamplifikasi jurus ampuh *supply* dan *demand* menyiasati kemajuan jaman.

Lalu dimanakah arena dari transformasi yang mungkin terjadi? Institusi apa yang sampai sekarang berperan sebagai wadah yang mengiringi kemajuan kapitalisme global? Bagaimanakah keterkaitan yang dapat kita lihat dengan kondisi global yang telah mencapai tataran konvergen ini? Tentu dapat kita temui lewat perkembangan kontemporer global dari multipolarisasi dunia lewat beberapa *legal parlement* maupun organisasi kawasan yang ada semisal UN (PBB), APEC, G8, UE, ASEM, dan sebagainya (Halawani, 2002: 250). Berbagai macam bentuk multipolarisasi di berbagai kawasan dunia tersebut tampaknya merupakan arena domain baru dalam melihat perspektif ideologi pasar kontemporer yang berkembang.

Karakteristik persamaan tujuan seperti di organisasi pada umumnya tampak terlihat sebagai kekuatan utama munculnya kelompok-kelompok global tersebut. Tentu saja dapat kita cermati bahwa hampir semua dari tujuan bersama yang ingin dicapai kelompok-kelompok global tersebut adalah sama yaitu ekonomi dan perdagangan. Hal ini bukan sesuatu yang alamiah terjadi (*by nature*) melainkan dorongan artifisial dari komponen otoritas masing-masing negara yang terlibat. Sekali lagi hukum pasar berbicara.

Wacana kecurigaan yang muncul dari kedua elemen (antara kapitalisme dan asosiasi global) akhirnya membawa kita pada sebuah arena dimana kapitalisme mengendalikan dan menjadi semacam ideologi yang disebarkan melalui asosiasi global semacam PBB dan UE. Maka menurut pendapat David C. Korten, bahwa dalam kapitalisme, demokrasi pun dapat dijual kepada penawar tertinggi dan bahwa pasar bebas tersebut direncanakan secara terpusat oleh megakorporasi yang bahkan ukuran sebenarnya lebih besar dari banyak negara yang ada (Korten, 2002). Tidak mengherankan arena kerjasama global maupun regional yang mungkin awalnya dibangun atas kesadaran untuk saling membantu, bahkan sampai tataran parlementer, tidak lepas dari jerat kuasa kapitalisme global bahkan turut menjadi ranah dimana ikut membesarkan dan menghidupinya. Domain asosiasi regional dan internasional tersebut mulai dilandasi ideologi untuk mengeruk keuntungan dari lawan-lawan mereka. Maka ketahanan modal adakalanya menjadi bentuk ideologi mendasar dalam kerjasama tersebut.

Salah satu asumsi yang diungkap George Soros dalam tesisnya mengenai konsep *Open*

*Society* dari Karl Popper dan kritiknya mengenai kapitalisme dikemukakan bahwa kapitalisme global telah menyebabkan negara-negara pusat berusaha menjadi majikan negara-negara pinggir – dalam istilah Soros *periphery* – dengan mengendalikan pertumbuhan ekonomi mereka (Soros, 2006). Dengan asumsi tersebut maka beberapa lembaga internasional hasil bentukan beberapa asosiasi kesepakatan global seperti *International Monetary Fund* (IMF) maupun *World Bank* pada dasarnya merupakan alat kuasa kapitalisme. Kedua lembaga tersebut dikatakan Soros merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh negara-negara sentral agar tetap bisa menguasai dan mengontrol negara-negara *peripheral* (negara berkembang dan terbelakang). Dengan kata lain sebagai seorang spekulan yang juga mendapat keuntungan dari kapitalisme, Soros telah memulai wacana kritis dalam memahami posisi atau disposisi kapitalisme sebagai anak emas dalam arena polarisasi kerjasama internasional yang tidak lebih hanya sebagai upaya mencari eksistensi keuntungan.

### **United Nations: Arena Megakorporasi Internasional**

Pada musim panas 1944, lima belas bulan sebelum berakhirnya Perang Dunia II, F. D. Roosevelt merancang sebuah konferensi masif yang pada perkembangannya menjadi landasan tatanan ekonomi dalam tubuh PBB. Konferensi Keuangan dan Finansial (*The United Nation Monetary and Financial Conference*) yang diadakan di Bretton Woods New Hampshire Juli 1944 dikatakan Gèlinas menandai sejarah awal perkembangan tatanan ekonomi baru yang mendasarkan pada 3 pilar utama yaitu Bank Dunia, IMF, dan GATT (yang pada tahun 1995 berubah menjadi WTO) dan tentu saja di bawah kontrol Amerika Serikat (Gèlinas, 2003: 126). Konferensi Bretton Woods ini awalnya bertujuan untuk membuat kerangka institusional mempromosikan investasi asing dan regulasi transaksi finansial diantara 169 delegasi ofisial termasuk USSR (Uni Soviet) yang pada akhirnya menolak menandatangani kesepakatan tersebut. Tampak kuasa dan aroma megakorporasi dari kapitalisme mulai bersemi bahkan di organisasi, yang apabila kita menilik Pembukaan Piagam PBB, didirikan atas dasar perdamaian, keadilan dan kesejahteraan (*Peace, Justice, dan Prosperity*).

Implikasi di era millennium ini adalah bahwa PBB dapat dipandang sebagai organisasi yang tidak lebih hanya mengambil sebagian roh kapitalisme dan menjadi arena baru yang dikendalikan oleh negara-negara adikuasa tempat leluhur kapitalisme tersebut yaitu Inggris dan Amerika Serikat.

Melalui ECOSOC (*The Economic and Social Council*) yang dibentuk sebagai komponen PBB dalam misi ekonomi dan sosial, maka kontrol atas Bank Dunia, IMF dan WTO pada satu sisi membawa ironi ketika banyak badan PBB seperti FAO, UNICEF, UNESCO, WFP, UNDP dan sebagainya seperti menjadi antitesis dari kontrol tersebut. Terlebih lagi banyak kebijakan yang dicetuskan dan menjadi kesepakatan di tingkat PBB seperti MDGs atau Protokol Kyoto dirancang oleh beberapa negara pemilik megakorporasi kepada negara-negara dunia ketiga. Ditambah lagi akan semakin ironis ketika badan-badan PBB tersebut sekitar 90 persen beroperasi di negara-negara berkembang. Tidak mengherankan ketika kita lalu mencium aroma kuat kapitalisme dalam konstelasi global misi-misi PBB.

Maka perubahan yang dapat dicermati melalui arena seperti PBB adalah sekalipun mekanisme pasar adalah karakteristik yang khas dalam kapitalisme, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat mengendalikan domain-domain yang bersifat non-pasar. Maka tidak mengherankan ke depan arena PBB dapat menjadi sebuah potret dan gambaran atas kuasa kapitalisme yang menjadikan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan mulai didefinisikan melalui terminologi uang. Konversi penerapan ideologi pasar ke dalam konteks dan

wilayah di luar bisnis dan ekonomi ini akan menjadikan PBB sebagai arena bermain baru megakorporasi dan korporasi transnasional.

### ***International Monetary Fund (IMF)***

Selama Perang Dunia Ke-II, pemerintah Inggris mencanangkan rencana “*Clearing Union*” dan pencetusnya Lord Keynes sedangkan Amerika Serikat memiliki dana stabilisasi dan pencetusnya Harry White (Halwani, 2002: 26). Beberapa ide yang melandasi terbentuknya IMF

1. Untuk meningkatkan jumlah cadangan negara yang memungkinkan negara tersebut mengatasi depresi tanpa melakukan kebijakan deflasi, devaluasi, dan pembatasan impor. Baik devaluasi dan pembatasan impor akan menimbulkan lingkaran setan yang akan membantu suatu negara yang bersifat sementara dan akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang.
2. Untuk memperbaiki posisi ketidakseimbangan neraca pembayaran, ide Keynes adalah untuk menciptakan mekanisme internasional dengan memberikan cara yang baik untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam posisi neraca pembayaran.
3. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa upaya suatu negara dalam menggulangi ketidakseimbangan neraca pembayaran adalah melakukan devaluasi.
4. Keynes melemparkan ide untuk mendirikan bank sentral yang dapat memberikan kredit dengan skala dunia, seperti yang dilakukan bank-bank sentral di tiap negara (Halwani, 2002: 261).

Sebagai realisasi tersebut, IMF didirikan pada tahun 1944 pada konferensi internasional yang ada di Bretton Wood, New Hampshire, dan beroperasi mulai tanggal 1 Maret 1947. setiap negara anggota menyumbang sejumlah dana dalam mata uang masing-masing pada IMF. Negara anggota dapat meminjam mata uang asing dengan syarat-syarat tertentu. Melalui cara tersebut peminjam dapat menghindari kenaikan nilai tukar. Nilai tukar telah ditetapkan oleh IMF pada tahun 1947, yang menyatakan bahwa setiap negara bebas mengubah nilai mata uangnya dalam margin kecil (5 % naik atau turun), tetapi lebih dari itu hanya dapat dilakukan oleh IMF (Halwani, 2002: 262).

IMF didirikan sebagai pemberi pinjaman terakhir (*Lender of Last Resort*) untuk pemerintah berbagai negara di dunia. IMF beroperasi atas dasar kontribusi 182 negara anggota. Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar sekitar 18% dari jumlah keseluruhan. Mengingat pendanaan IMF berasal dari negara-negara anggota, kontribusi dan peranan Amerika Serikat di IMF jadi meningkat beberapa kali lipat.

IMF merupakan alat praktis diplomasi tingkat tinggi finansial Amerika Serikat. Pendanaan yang relatif kecil untuk negara berkembang, namun memberikan kesempatan pemerintah Amerika Serikat (bersama-sama pemerintah negara Uni Eropa dan Jepang) secara efektif mengendalikan aliran pinjaman untuk negara berkembang sehingga tidak ada aliran dana yang tanpa persetujuan Kongres Amerika Serikat (Halwani, 2002: 262).

### ***Bank Dunia (The World Bank)***

IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) lebih dikenal sebagai Bank Dunia (*World Bank*) semula didirikan dalam rangka membantu negara-negara yang rusak akibat perang untuk melakukan transisi lewat rekonstruksi. Lembaga ini terikat dengan PBB sehingga anggota *World Bank* juga merupakan anggota dari IMF.

Namun dalam perkembangan situasi dunia yang relatif tidak diwarnai perang lagi fungsi bank dunia pun bergeser. Tidak lagi memprioritaskan proyek rekonstruksi, tetapi lebih sebagai

channel untuk menyalurkan dana dari negara-negara kaya untuk pembangunan ekonomi negara berkembang atau lebih miskin yang membutuhkan. Tujuan sentral dari lembaga ini adalah membantu meningkatkan kemajuan sosial-ekonomi negara berkembang, dengan prioritas mendorong peningkatan produktivitas negara penerima pinjaman atau bantuan. Dalam kerangka ini bank dunia mengumpulkan dana dari negara-negara maju di pasar uang dan meminjamkannya untuk proyek dan program berskala prioritas tinggi di negara-negara yang lebih miskin (Halwani, 2002: 278).

### ***General Agreement on Tariff and Trade (GATT)***

GATT adalah perjanjian internasional, multilateral, yang banyak mengatur perdagangan internasional sesudah Perang Dunia Ke-II dan didirikan tahun 1948. GATT lahir setelah industri di Barat mengalami banyak proteksionisme dan semangat autarki yang berkembang setelah depresi besar tahun 1929.

Pada masa tersebut, setiap negara membatasi perdagangan impor atau ekspor. Alasannya adalah proteksi untuk produsen, proteksi untuk konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. Negara berkembang cenderung melindungi industrinya yang masih muda (*infant industry*) (Halwani, 2002: 334).

Tujuan GATT adalah:

1. Terjadinya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi.
2. Menempuh disiplin di antara anggotanya supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota lain.
3. Mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak (Halwani, 2002: 334)

Namun, aturan GATT tidak mengharuskan perdagangan bebas tanpa syarat karena dunia memang belum atau tidak mencapai hasil secara utuh. Oleh karena itu, GATT hanya berusaha ke aturan perdagangan yang lebih bebas, atau *fair trade* tanpa diskriminasi untuk memeperbesar pertumbuhan dunia. Pada 8 Desember 1994, disepakati GATT menjadi WTO (*World Trade Organization*) yang menjalankan fungsinya sbagai badan pengawas perdagangan bebas dunia. Namun pada perjalanannya banyak mendapat keluhan dari negara-negara berkembang karena WTO hanya sebgai bentuk pelecehan terhadap perdagangan global (Halwani, 2002: 343)

### **Parlemen Eropa dan Ideologi Pasar**

Sejak diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman pada 9 Mei 1950, Uni Eropa telah berkembang menjadi kekuatan penyeimbang baru terutama bagi negara-negara dunia lama di Eropa Barat dan Selatan. Perluasan Uni Eropa telah menjangkau 25 negara termasuk negara-negara Eropa Timur seperti Rumania dan Bulgaria yang dulunya mempunyai asas sosialis. Uni Eropa merupakan organisasi kawasan yang memiliki Parlemen Eropa yang berkedudukan di Brussel, Belgia yang berfungsi sebagai kuasa sentral negara-negara anggotanya namun tidak menghilangkan eksistensi negara-negara anggotanya. Berbeda dengan organisasi kawasan lain, negara-negara anggota Uni Eropa juga mengalihkan sejumlah kewenangannya pada tingkat Eropa baik melalui Parlemen Eropa atau Dewan Eropa. Maka dapat dibayangkan kedigdayaan dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang meningkat pesat terutama dalam 3 dekade terakhir yang ditandai melalui peluncuran mata uang tunggal Euro pada tahun 1999 yang mulai berlaku pada Januari 2002.

Uni Eropa akan semakin luas jika melihat Turki yang dijadwalkan bergabung tahun 2007 ini dan menjadi kekuatan pemodal baru. Maka di belahan dunia lain ideologi pasar mulai bersemi

dan berkembang kembali khususnya di kawasan era dunia lama yang mencetuskan imperialisme dan merkantilisme. Kekuatan penyeimbang baru ini memang terkesan sebagai oposisi hegemoni Amerika Serikat, namun tampaknya UE juga justru akan menjadi pemangsa baru yang dikendalikan roh kapitalisme. Arena dan proses perubahan yang sedang terjadi di Eropa pada dasarnya memberikan ruang gerak baru bagi kapitalisme untuk semakin meneguhkan kuasanya di dunia global ini.